



Analisis Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Public (*Public Trust*) (Studi Kasus Korupsi Benih Jagung di Nusa Tenggara Barat)

Siska Dinda Astuti¹

¹*Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram*

¹Correspondence Email: siskacantik800@gmail.com

Received: 15 Februari 2025	Accepted: 25 March 2025	Published: 30 March 2025
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Abstract

Artikel ini membahas dampak korupsi terhadap kepercayaan publik (public trust) di Indonesia, khususnya terkait kasus korupsi pengadaan benih jagung di Nusa Tenggara Barat (NTB). Korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan penegakan hukum, akses terhadap layanan publik, dan stabilitas politik serta sosial. Artikel ini menjelaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan transparansi menjadi sangat penting dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Keywords: *Korupsi, Kepercayaan public, Pengadaan Benih Jagung*

A. Introduction

Korupsi merupakan masalah global yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, namun juga melemahkan penegakan hukum, melemahkan kepercayaan publik, dan melemahkan akses terhadap layanan publik. Akses terhadap pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi sepertinya menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan negara untuk kepentingan individu atau kelompok tanpa hak merupakan tanda korupsi. Kasus korupsi terjadi di semua tingkatan, baik di birokrasi pemerintahan, pengadilan, dan bidang lainnya. Dalam dunia birokrasi, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi, bahkan di tingkat desa, tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri (Wulandari et al 2020). Korupsi tampaknya sudah mengakar kuat di pemerintahan Indonesia. Situasi di lapangan mencerminkan korupsi yang meluas. Ironisnya, tindakan korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga perampasan keuangan negara secara kolektif. Hal ini mencerminkan rendahnya moral dan rasa malu. Yang menonjol di sini adalah sikap serakah (Hazmi 2024).

Menurut (Zakaria 2023), pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk menangani pelayanan publik dan berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada semua pihak yang menyelenggarakan hubungan pemerintahan, dan sebagai hasilnya, kepada seluruh anggota masyarakat yang terkena dampaknya pelayanan publik sesuai kebutuhan dan kebutuhannya dari mereka yang diperintah. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang wajib melaksanakan hak-hak masyarakat dan juga menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Membangun pemerintahan yang baik memerlukan etika dan moral yang baik dan bertujuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Namun hal ini belum berjalan di

Indonesia, dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap etika dan moral pegawai negeri sipil sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan (Nadyawati, 2023).

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat dan petinggi negara telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Akibat dari kejadian ini adalah melemahnya konsep kepercayaan publik yang seharusnya menjadi landasan utama hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat berdampak negatif tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi namun juga stabilitas politik dan sosial. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap konsep public trust di Indonesia, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas kepercayaan dan kepentingan publik. Menurut (Perkasaputra et al 2023) Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi negara merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik menjadi sangat penting dalam konteks kasus ini.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat (NTB) dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung hibrida senilai Rp 27,35 miliar pada 2017. Hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibacakan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP melakukannya. Para terdakwa terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan benih jagung hibrida yang ditugaskan langsung ke PT SAM dan PT WBS. Beberapa alasan yang diajukan terhadap terdakwa antara lain tidak mengakui perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 27,35 miliar, dan tidak menjaga kepercayaan terhadap

pengelolaan keuangan negara. Akibat perbuatan Tergugat, banyak petani yang kehilangan akses terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah.

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap konsep public trust di Indonesia. Beliau diduga terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan dana proyek infrastruktur dalam skala besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara. Implikasi dari kasus ini adalah melemahnya konsep public trust, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang terkikis dapat berdampak buruk pada stabilitas politik dan sosial, serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya pencegahan korupsi perlu ditingkatkan untuk memulihkan public trust dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.

Dalam Penelitian (Perkasaputra et al 2023.) telah membahas mengenai konsep korupsi, peran Kementerian Pertanian sebagai badan publik, dan konsep public trust dalam pemerintahan Indonesia. Penelitian ini mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Penelitian ini juga telah menjelaskan peran Kementerian Pertanian sebagai badan publik yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat. Selain itu, konsep public trust telah dibahas sebagai hasil dari kinerja dan kualitas administrasi publik yang mempengaruhi administrasi itu sendiri.

Analisis skandal korupsi menteri Pertanian juga di lakukan (Zakaria 2023.) menyatakan skandal korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian dari sudut pandang etika dan moral. Analisis mendalam dilakukan terhadap implikasi kasus korupsi terhadap prinsip-prinsip

etika seperti keadilan dan kebenaran. Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan setara di dalam suatu masyarakat, sementara prinsip kebenaran menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam interaksi sosial.

Para sarjana jarang membuat artikel dasar yang berfokus pada Analisis dampak korupsi terhadap kepercayaan publik (public trust), maka dari itu penelitian ini berusaha mengisi kekosongan pengetahuan di bidang tersebut. Dengan menganalisis dampak korupsi terhadap tingkat kepercayaan publik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi dan sosiologi.

B. Method

Korupsi merupakan masalah global yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, namun juga melemahkan penegakan hukum, melemahkan kepercayaan publik, dan melemahkan akses terhadap layanan publik. Akses terhadap pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi sepertinya menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Pemanfaatan kekayaan negara untuk kepentingan individu atau kelompok tanpa hak merupakan tanda korupsi. Kasus korupsi terjadi di semua tingkatan, baik di birokrasi pemerintahan, pengadilan, dan bidang lainnya. Dalam dunia birokrasi, mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi, bahkan di tingkat desa, tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri (Wulandari et al 2020). Korupsi tampaknya sudah mengakar kuat di pemerintahan Indonesia. Situasi di lapangan mencerminkan korupsi yang meluas. Ironisnya, tindakan korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga perampasan keuangan negara secara kolektif. Hal ini mencerminkan rendahnya moral dan rasa malu. Yang menonjol di sini adalah sikap serakah (Hazmi 2024).

Menurut (Zakaria 2023), pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk menangani pelayanan publik dan berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada semua pihak yang menyelenggarakan hubungan pemerintahan, dan sebagai hasilnya, kepada seluruh anggota masyarakat yang terkena dampaknya pelayanan publik sesuai kebutuhan dan kebutuhannya dari mereka yang diperintah. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang wajib melaksanakan hak-hak masyarakat dan juga menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Membangun pemerintahan yang baik memerlukan etika dan moral yang baik dan bertujuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Namun hal ini belum berjalan di Indonesia, dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap etika dan moral pegawai negeri sipil sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat dan petinggi negara telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Akibat dari kejadian ini adalah melemahnya konsep kepercayaan publik yang seharusnya menjadi landasan utama hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat berdampak negatif tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi namun juga stabilitas politik dan sosial. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap konsep public trust di Indonesia, di mana pejabat publik bertanggung jawab atas kepercayaan dan kepentingan publik. Menurut (Perkasaputra et al 2023) Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan petinggi negara merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik menjadi sangat penting dalam konteks kasus ini.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat (NTB) dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus

dugaan korupsi pengadaan benih jagung hibrida senilai Rp 27,35 miliar pada 2017. Hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibacakan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP melakukannya. Para terdakwa terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan benih jagung hibrida yang ditugaskan langsung ke PT SAM dan PT WBS. Beberapa alasan yang diajukan terhadap terdakwa antara lain tidak mengakui perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 27,35 miliar, dan tidak menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Akibat perbuatan Tergugat, banyak petani yang kehilangan akses terhadap bantuan benih jagung dari pemerintah.

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap konsep public trust di Indonesia. Beliau diduga terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan dana proyek infrastruktur dalam skala besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara. Implikasi dari kasus ini adalah melemahnya konsep public trust, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang terkikis dapat berdampak buruk pada stabilitas politik dan sosial, serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya pencegahan korupsi perlu ditingkatkan untuk memulihkan public trust dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.

Dalam Penelitian (Perkasaputra et al 2023.) telah membahas mengenai konsep korupsi, peran Kementerian Pertanian sebagai badan publik, dan konsep public trust dalam pemerintahan Indonesia. Penelitian ini mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan,

kesempatan, atau fasilitas yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Penelitian ini juga telah menjelaskan peran Kementerian Pertanian sebagai badan publik yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat. Selain itu, konsep public trust telah dibahas sebagai hasil dari kinerja dan kualitas administrasi publik yang mempengaruhi administrasi itu sendiri.

Analisis skandal korupsi menteri Pertanian juga di lakukan (Zakaria 2023.) menyatakan skandal korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian dari sudut pandang etika dan moral. Analisis mendalam dilakukan terhadap implikasi kasus korupsi terhadap prinsip-prinsip etika seperti keadilan dan kebenaran. Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan setara di dalam suatu masyarakat, sementara prinsip kebenaran menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam interaksi sosial.

Para sarjana jarang membuat artikel dasar yang berfokus pada Analisis dampak korupsi terhadap kepercayaan publik (public trust), maka dari itu penelitian ini berusaha mengisi kekosongan pengetahuan di bidang tersebut. Dengan menganalisis dampak korupsi terhadap tingkat kepercayaan publik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi dan sosiologi.

1. Result

Fakta Terungkapnya Kasus Korupsi Benih Jagung

Kejati NTB Menetapkan Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan benih jagung, mantan Distanbun dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan benih jagung hibrida senilai Rp 27,35 miliar pada 2017.

Proyek pengadaan benih jagung tahun 2017 ini berasal dari Program Tanam Jagung Nasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

RI, dimana Provinsi NTB mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektar dan target panen saat itu sebesar 380.765 hektar. Pengadaan tersebut diperluas ke seluruh kabupaten/kota yang ada yang tersebar di NTB dengan anggaran Rp 100 juta. 48.256 miliar dari total pengadaan nasional senilai Rp 170 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi benih jagung di dinas pertanian dan perkebunan nusa tanggara barat ini melibakan setidaknya 4 orang tersangka yaitu: 1) Kepala dinas pertanian dan perkebunan NTB tahun 2017 sebagai kuasa pengguna anggaran 2) Pejabat pembuat komitmen (PPK), 3) Rekanan pengandaan benih jagung atau direktur PT wahana (PT WBS4) 4) Direktur perusahaan penyediaan barang dari PT Sinta Agro Mandiri (SAM) (Imansyah 2022).

Ke 4 tersangka di kenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 undang-undang pemberantasan pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam pembeksan turut terantum hasil perhitungan kerugian negara dari ahli audit yakni Badan Keuangan Dan Pembngunan (BPKP) perwakilan NTB. Nilai kerugian menapai Rp. 27,5 miliar dengan kolkulaasi PT SAM Rp. 15,43 miliar, dan PT WBS Rp. 11,92 Miliar .

Munculnya kerugian tersebut berdasarkan populasi hitungan tim ahli audit kerugian negara secara menyeluruh. Kerugian dari adanya sertifikat yang salah atau palsu, duyplikat dan yang tidak bersertifikat. Kemudian ada juga sertifikat yang tidak sesuai dengan surat perintah penarian dana (SP2D).penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap untuk tahap pertama dengan anggaran Rp. 17,256 miliar dilaksanakan oleh PT SAM dan tahap kedua senilai Rp. 31 miliar oleh PT WBS (antaranews.25 Mei 2024).

Implikasi Kasus Korupsi Benih Jagung Terhadap Public Trust

Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat disebabkan oleh menurunnya moral lembaga dan pejabat negara. Hal itulah yang dilakukan mantan Menteri Pertanian itu. Ketika kepercayaan masyarakat

menurun, masyarakat mulai tidak mempercayai aktivitas pemerintah. Menurut Erber dan Lau (dalam Perkasaputra et al 2023.), legitimasi suatu pemerintah dapat terancam jika mayoritas masyarakat tidak mempercayainya dalam jangka waktu yang lama, yang dapat mengarah pada aktivitas ilegal atau dukungan terhadap partai politik yang radikal atau anti-demokrasi mendukung. Lebih lanjut, menurut Hetherington (dalam Perkasaputra et al 2023.), *The Political Relevance of Trust*, kepercayaan publik meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan demokratis, dan kepercayaan ini meningkatkan hubungan antara warga negara dan lembaga yang mewakili mereka koneksi antara .

Erosi kepercayaan Publik

Erosi kepercayaan publik Kasus korupsi semacam ini dapat secara signifikan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi terkait. Rakyat cenderung merasa dikhianati dan merasa bahwa pejabat-pejabat publik tidak dapat diandalkan untuk bertindak demi kepentingan rakyat. Kasus korupsi ini dapat mengikis secara drastis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dan lembaga pemerintah. Masyarakat cenderung merasa dikhianati dan ragu bahwa aparat negara akan berbuat yang terbaik bagi kepentingan rakyat.

Perlakuan koruptif para pejabat negara berkaitan dengan kasus ini berpotensi merusak secara mendasar kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya. Masyarakat awam cenderung merasa dibodohi dan meragukan komitmen aparat untuk melayani kepentingan rakyat. Insiden korupsi macam ini dapat mengikis secara signifikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja pemerintahan. Rakyat cenderung merasa dikhianati dan meragukan bahwa pejabat negara akan benar-benar mementingkan kepentingan publik. Menggerus secara drastis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaganya. Masyarakat umum kerap merasa dibodohi dan meragu bahwa aparat negara berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat. Tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas dan instansi pemerintah. Rakyat rawan merasa dikhianati dan meragukan

bahwa para pelaku publik memiliki dedikasi kuat untuk berpolitik demi kemaslahatan masyarakat.

Tuntutan Akuntabilitas Yang Meningkat

Tuntutan akuntabilitas yang meningkat Masyarakat cenderung akan menuntut lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat akan semakin mendesak agar pemerintah bersikap lebih transparan dan terbuka soal pengelolaan anggaran negara serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Tuntutan rakyat untuk pemerintah bersikap lebih akuntabel mengenai penggunaan dana publik dan pelaksanaan program pembangunan akan semakin meningkat setelah terjadi kasus korupsi ini. Masyarakat cenderung akan lebih gigih meminta pertanggungjawaban dan keterbukaan dari pemerintah seputar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan proyek-proyek. Diperkirakan akan semakin mendesak pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan berbagai program untuk masyarakat. Terjadi korupsi berpotensi menyebabkan masyarakat semakin keras menuntut agar pemerintah bersikap lebih terbuka dan akuntabel soal pengelolaan dana dan kinerja pelayanan publik. Tekanan masyarakat untuk pemerintah menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan diprediksi akan menguat setelah terkuaknya kasus korupsi.

Hambatan Dalam Pembangunan

Hambatan dalam Pembangunan menurunnya kepercayaan publik dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan dan reformasi yang membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan yang memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat menghalangi

pemerintah melaksanakan program pembangunan dan reformasi yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dapat mempersulit penerapan kebijakan yang memerlukan kerja sama dan dukungan partisipatif dari masyarakat lokal. Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dan perbaikan yang memerlukan partisipasi aktif dan dukungan masyarakat. Rendahnya kepercayaan masyarakat juga dapat menjadi penghambat pelaksanaan berbagai program pemerintah yang bergantung pada partisipasi konstruktif masyarakat dalam prosesnya. Rusaknya reputasi pemerintah dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan dan reformasi yang memerlukan kontribusi signifikan dari masyarakat lokal sebagai mitra.

Upaya Pemulihan Public Trust

Kepercayaan masyarakat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan dijaga jika suatu negara ingin mencapai keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan publik juga menjamin pengelolaan urusan publik yang baik. Ketika kepercayaan masyarakat dirusak oleh tindakan suatu departemen pemerintah, pemerintah harus berupaya memulihkan kepercayaan tersebut sebelum masyarakat menjadi apatis dan skeptis terhadap pemerintah (Perkasaputra et al 2023.)

Pemulihan public trust dalam kasus korupsi Kepala Dinas Pertanian NTB dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang relevan. Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor. Hasan & Hantoro (dalam Perkasaputra et al 2023.) menyoroti pentingnya penegakan hukum dan transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Tindakan hukum yang tegas dan transparan akan memberikan sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi. Upaya pencegahan korupsi juga harus dilakukan melalui reformasi hukum yang mengikat dan membuat pejabat takut terhadap korupsi. Undang-undang yang jelas dan kuat dapat

memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan korupsi.

Memperkuat komitmen anti korupsi dengan menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan keterbukaan informasi penggunaan dana publik. Melakukan komunikasi intensif ke masyarakat untuk meyakinkan komitmen reformasi dan pembersihan. Merevisi aturan dan sistem pengelolaan keuangan negara agar lebih akuntabel dan transparan. Membangun ombudsman atau lembaga independen yang mengawal kinerja pemerintah. Memperbaiki layanan publik agar lebih memuaskan kebutuhan masyarakat. Mengampanyekan prestasi dan pencapaian program pemerintah secara terbuka dan dapat diverifikasi. Meminta maaf secara tulus atas kesalahan dan memelihara dialog intensif dengan masyarakat. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pemerintahan.

D. Conclusion

Kasus korupsi pengadaan benih jagung di NTB yang melibatkan pejabat pemerintah, khususnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, telah secara signifikan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan penegakan hukum, aksesibilitas terhadap layanan publik, serta stabilitas politik dan sosial. Artikel ini menekankan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Pemulihan kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya dengan membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan

publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan, sehingga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dapat terjaga dengan baik.

Bibliography

- Hazmi, R. A. Al. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1-10.
- Imansyah, I. (2022). Pola-Pola Korupsi di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pengadaan Bibit Jagung di Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2017). *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 1-56.
- Nadyawati, L. (2023). Efektivitas Implementasi Aplikasi Simpledesa Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Desa Gili Indah. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1-18.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APLIKASI SIMPLEDESA.pdf
- Perkasaputra, A., Mahdi, M. R. W., & Puspitasari, R. T. (2023). Analisis Kasus Korupsi Menteri Pertanian Syl Dan Implikasinya Terhadap Konsep Public Trust Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 111-120.
- Wulandari, L., Hidayat, S., & Lubis, L. (2020). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2).
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.44>
- Zakaria, A. A. (2023). Analisis Etika dan Moral : Skandal Korupsi Menteri Pertanian. *Medical Genetics*, 1(1), 1-2.